BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum tersebut diatur dan diberi akibat oleh hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata. Namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sering kali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. selain itu sengketa juga dapat disebabkan oleh aturan-aturan yang kaku yang dianggap sebagai penghalang atau penghambat untuk dapat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak karena para pihak akan berupaya semaksimal mungkin

untuk mencapai tujuannya sehingga, potensi terjadinya sengketa semakin besar.¹

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh main hakim sendiri, tetapi harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apabila jika para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaian melalui pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*). Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesain perkara dimintakan melalui pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum acara perdata bersifat sederhana dalam beracara didepan sidang pengadilan. **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat sebagai berikut :
“Sifat hukum acara perdata diindonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 9-11

orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman belanda dianut oleh Raad van Justitie dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis) , lambat lain sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehenak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana”²

Salah satu asas dalam hukum beracara perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap orang yang sedang beracara dipengadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga dari berita acara pemeriksaan dipersidangan samapai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara perdata

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Ramapi Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 halaman 7

dipengadilan diharapkan proses beracara tersebut tidak ditunda-tunda sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan masing-masing pihak. Namun dalam praktik dipengadilan, hal itu sangat bertolak belakang dengan penerapan asas-asas tersebut. Karena penyelesaian perkara dipengadilan memerlukan waktu yang lama dan berbelit-belit untuk menyelesaikan masalah. Jumlah perkara yang banyak , jadwal sidang molor, salah satu pihak belum hadir atau tiba-tiba hakim sakit , akibatnya jadwal sidang yang tertera di surat panggilan tak terpenuhi atau tidak sesuai. Oleh karena itu memerlukan biaya yang cukup banyak untuk membayar kuasa hukum untuk menyelesaikan perkara akibat waktu yang terlalu lama. Sistem penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Sistem penyelesaian yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, termasuk dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

Baru baru ini Mahkamah Agung memperkenalkan model gugatan sederhana atau lazim disebut *small claim court* (SCC). Model gugatan ini dituangkan dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Salah satu rasio hukum keluarnya kebijakan ini adalah perkembangan hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana. Terbitnya PERMA juga menjadi salah satu solusi mengatasi

penumpukan berkas dan mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung . Dalam gugatan sederhana nilai gugatan materil paling banyak adalah 200.000.000 (Pasal 1 Angka 1 Perma No. 2015). Lantaran dianggap masih belum sepenuhnya mencerminkan adanya prinsip cepat, singkat dan biaya ringan ada beberapa perubahan yakni kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal 200.000.000 menjadi 500.000.000 pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Mahkamah Agung juga merubah ketentuan isi PERMA tentang batas domisili gugatan yaitu memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan verstek mengenal sita jaminan dan eksekusi). Gugatan sederhana dengan proses sederhana dan dipimpin oleh Hakim tunggal. Waktu penyelesaian juga tidak boleh lebih dari 25 hari sejak sidang pertama ditetapkan. Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum atau advokat seperti dalam gugatan perkara perdata biasa. Namun para pihak tergugat dan penggugat dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Pelaksanaan gugatan sederhana tersebut tentu adanya aspek-aspek kesederhanaan. Melalui kesederhanaan prosedur penyelesaian perkara tentunya dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam beracara perdata di Pengadilan. Perkara gugatan sederhana adalah perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi.

Maka hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan Mahkamah Agung ini cukup efektif penerapannya di Pengadilan Negeri Demak.³

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi. Dimana fokus pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 yang berjudul “ **Pelaksanaan PERMA No. 4 2019 Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

³ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam mengembangkan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya tentang pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa mengangkat ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang pelaksanaan PERMA No.2 tahun 2015 jo PERMA No. 4 tahun

2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

E. Terminologi

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah apa yang diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

2. Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan

⁴<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html> diakses pada 16 Oktober 2019 jam 10.00 WIB

dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif dan kriminal dibawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*. Pengadilan merupakan cara utama untuk menyelesaikan perselisihan dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke Pengadilan. Dan juga pihak tertuduhkejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di Pengadilan.⁵

3. PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau disebut *small claim court* sebagaimana diatur dalam Perma 2/2015 merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000. Mekanisme penyelesaian simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah kebawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke Pengadilan.

Small claim court mulai berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke dua puluh tepatnya pada tahun 1913 di Cleveland sebagai bentuk dari reformasi dari sistem penyelesaian litigasi yang pada

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan> diakses pada 16 Oktober 2019 jam 10.00 WIB

umumnya memerlukan waktu yang lama dengan kompleksitas dan kerumitan yang tinggi serta biaya yang mahal. Kondisi tersebut selalu menjadi kendala bagi masyarakat menengah kebawah untuk menyelesaikan sengketa atau sekedar menagih hutang kepada debitur yang wanprestasi melalui jalur pengadilan.

Small claim court berkembang pesat di banyak negara di dunia, baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*. Gugatan sederhana adalah salah satu mekanisme penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang bersifat memutus (*adjudikasi*) dengan proses pemeriksaan lebih cepat. Gugatan sederhana merupakan jalan tengah antara mekanisme *alternative dispute resolution* (non litigasi) yang sederhana dan fleksibel dengan mekanisme penyelesaian melalui lembaga yang memiliki otoritas sebagai pemutus, sehingga keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya (*executable*).

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini digunakan

dalam penelitian guna melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan PERMA No. 4 tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejalanya.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di obyek penelitian. Yaitu Hakim ketua majelis dan Hakim anggota yang menangani proses pemeriksaan pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak, diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak dan Panitera.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan mencari buku-buku, jurnal, dokumen dan berbagai sumber penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan dan mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer .

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

4. Metode Analisis Data

Data penelitian diolah dan analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau

paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan ini dilakukan dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi yang ada pada dasarnya memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang uraian tinjauan hukum tentang gugatan sederhana yang didalamnya membahas hukum acara perdata, perkara perdata, gugatan, wanprestasi, gugatan sederhana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak serta hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi dua bagian yang saling berkesinambungan terkait hasil penelitian yaitu: kesimpulan yang menyajikan makna secara terpadu terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh, dan dari kesimpulan yang diperoleh peneliti selanjutnya dapat memberikan saran-saran atau rekomendasi dalam penelitian.